Universitas Hasanuddin - Makassar Tadjuddin Parenta

Undang-Undang Dan Kondisi Saat Ini Pembigara

Dialog Nasional Tentang Desentralisasi (National Dialogue on Decentralization)

Project 497-0357 / 104-000 Strategic Objective 1 ECG, USAID/Indonesia Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park

June 26 - 28, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project). The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

DIALOG NASIONAL TENTANG DESENTRALISASI

UNDANG-UNDANG DAN KONDISI SAAT INI PEMBICARA: - TADJUDDIN PARENTA (Mod)

- Desentralisasi merupakan reaksi dari sentralisasi/kekebalan Pemerintah Pusat.
- Desentralisasi merupakan keseimbangan pembagian pendapatan bagi daerah-daerah.
- Pembagian pendapatan sebagian besar jatuh bagi pengelola negara dibandingkan pembagian pendapatan atas pembelanjaan bagi masyarakat (daerah-daerah).
- Sebetulnya orde-orde terdahulu adalah orde militer yang berorientasi pada kekuasaan dimana aturan-aturan yang dijalankan adalah aturan kemiliteran, apabila ada pendapat-pendapat yang berbeda harus dibetulkan. (Style of Government is Militery).
- Perkembangan di dalam pengelolaan Negara mengenai sumber-sumber daya daerah penguasaanya harus dipengang oleh Local People.
- Desentralisasi merupakan reaksi dari sentralisasi/kekebalan Pemerintah Pusat. Dari reaksi inilah yang mendorong terbentuknya undang-undang tentang pembagian pendapatan/pembiayaan bagi daerah.
- Mampukah pemerintah pusat menetapkan rambu-rambu desentralisasi bagi daerah.
- Diharapkan rambu-rambu/perundang-undangan tentang otonomi daerah mampu menciptakan sistem yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana kewenangan masing-masing pemerintahan dibatasi ruang lingkupnya sehingga tidak ada perampasan kewenangan.
- Diharapkan dengan perundang-undangan tersebut mampu memberikan jalan desentralisasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang memberikan manfaat bagi pembagunan daerah maupun bagi pemerintah pusat.

- Alasan desentralisasi ialah Efisien.
- Desentralisasi penting bagi negara yang berorientasi pada pasar bebas iak dikarenakan tiap daerah bagi suatu negara memiliki kekayaan tersendiri.
- Setiap daerah perlu mengembangkan sumber daya yang dimilikinya agar setiap negara tidak tergantung dari kekuatan/bantuan sumber daya daerah lain.

DIALOG NASIONAL TENTANG DESENTRALISASI

REALITAS DESENTRALISASI PEMBICARA

: - ABDUL HAMID PADDU (Mad)

- Penyebarluasan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/propinsi dimana
- Penyebaran tanggung jawab ini akan mempermudah pemerintah menjalankan pemerintahan.
- Pentingnya realisasi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.
- Kombinasi elit politik didaerah yang mewakili kepentingan elit politik itu sendiri.
- Realisasi desentralisasi merupakan proses yang berkelanjutan yang memakan waktu dimana keadaan negara dalam keadaan masa transisi agar dapat beradaptasi terhadap pelayanan yang jadi tanggung jawabnya.
- Muncul kerisauan essensi desentralisasi dari level yang tinggi ke level yang tendah seberapa jauh kerisauan pemerintah pusat yang dapat dicermati dalam program-program pemerintah.

Intisari pengkajian realitas desentralisasi:

Desentralisasi fiskal, dampak positif kebijakan tersebut menciptakan defisit pada anggaran daerah.

Sasaran desentralisasi yang ingin ditempuh:

- 1. Sumber pembiayaan daerah sekaligus menjadi sumber operasional daerah.
- 2. Sumber pembiayaan daerah membantu/memudahkan pembiayaan pusat untuk daerah secara langsung.
- 3. Sistem yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembiayaan maupun pembangunan di daerah maupun pemerintah pusat.
- Perhatikan pusat yang perlu ditingkatkan terhadap pembangunan di daerah dalam membantu memobilisasi pembiayaan daerah.
- 5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infra struktur serta pengelolaannya oleh pemerintah daerah.
- 6. Sistem kontrol tetap ditangan pemerintah pusat dalam menjalankan desentralisasi.

Desentralisasi bermanfaat karena memberikan alternatif bagi kehidupan masyarakat secara efisien dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Desentralisasi yang baik tergantung dari legitimasi pemerintah daerah maupun pusat.